

# Aktivitas dan Perjuangan WNI Kerurungan China dalam Persamaan Hak Sebagai Warga Negara Tahun 1954 – 1965

**Theresia Tri Ranti<sup>1</sup>, Ali Imron<sup>2</sup>, Cheri Saputra<sup>3</sup>**

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: [theresiaranti5@gmail.com](mailto:theresiaranti5@gmail.com)


**Abstract** - This study aims to find out how the activities and struggles of the ethnic Chinese community against discrimination that occur to them. The method used in this research is to use a qualitative approach with historical methods. Collecting data using documentation techniques and library techniques. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique because the data obtained is not in the form of numbers so that it cannot be tested statistically. Activities and struggles carried out by residents of ethnic Chinese descent are carried out in various ways, both individually as was done by Oei Tjoe Tat who sits in government. PDTI does not want the problem of "small groups", Perwitt's statement regarding the draft citizenship law, Baperki's request to participate in perfecting the Pancawardhana, Expectations of Baperki Commission IV in fighting discrimination and racism, Baperki's Plenary Conference is a milestone in the struggle against discrimination'. While the struggle carried out by the ethnic Chinese community, Baperki's struggle to abolish regulations that were considered discriminatory, Baperki's struggle against discrimination started from the first regional congress of Baperki, the struggle for the right for Buddhists to be treated the same as other religions. that Buddhism should be treated the same as other religions In 1964 Baperki made a request to the central government, to be included in the State Committee for the Perfection of Pancawardhana, besides that it can also be done in groups by following organizations such as BAPERKI, PDTI and so on. All the struggles carried out by the ethnic Chinese community are to be free from discrimination that occurs. This is reinforced by data through a literature study conducted at the National Archives of the Republic of Indonesia.

**Keywords:** Activity, Struggle, Tionghoa ethnicity

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah aktivitas dan perjuangan masyarakat Etnis Tionghoa dalam melawan diskriminasi yang terjadi kepada mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh bukan berupa angka-angka sehingga tidak dapat diuji secara statistik. Aktivitas dan perjuangan yang dilakukan oleh warga keturunan Etnis Tionghoa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara perseorangan seperti Oei Tjoe Tat yang duduk di pemerintahan. Aktivitas yang dilakukan melalui organisasi-organisasi yaitu: PDTI tidak menghendaki adanya persoalan "golongan kecil", pernyataan Perwitt mengenai rancangan undang-undang kewarganegaraan, permintaan Baperki untuk turut serta dalam penyempurnaan Pancawardhana. Sedangkan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa diantaranya perjuangan yang dilakukan oleh Baperki menghapus peraturan yang dinilai diskriminatif, perjuangan yang dilakukan oleh BAPERKI salah satunya yaitu mereka membuat pernyataan bersama bahwa Agama Budha yang harus diperlakukan sama seperti agama lain. Segala perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Etnis Tionghoa yaitu demi terbebas dari diskriminasi yang terjadi. Hal ini diperkuat dengan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

**Kata Kunci:** Aktivitas, Perjuangan, Etnis Tionghoa

 © 2023; published by UIKTEN. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

The article is published with Open Access at <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jips>

## 1. PENDAHULUAN

Etnis Tionghoa di Indonesia pada saat zaman kolonial sering sekali mendapatkan diskriminasi, permasalahan rasial, cap negatif dan lain sebagainya. Berbagai permasalahan itu juga sering didapatkan oleh

orang-orang Tionghoa dalam aktifitasnya di dunia Politik maupun pemerintahan Indonesia. Orang Tionghoa dikhawatirkan hanya menjadi “binatang ekonomi” yang bersifat oportunistis, tidak memiliki loyalitas politik, tidak nasionalis dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Maka dari itu kebanyakan orang minoritas Tionghoa lebih memilih menjauhkan diri dari dunia politik.

Beberapa contoh mengenai diskriminasi rasial yang terjadi yaitu Pertama, pemerintahan orde lama Presiden Soekarno menjanjikan persamaan hak-hak sipil dan politik kepada etnis Tionghoa tetapi dalam kenyataannya masih saja terjadi diskriminasi di antaranya dalam kesempatan menjadi pimpinan Nasionalis Indonesia seperti yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu posisi kaum etnis Tionghoa di bidang ekonomi yang masih menguasai perdagangan secara tetap melakukan ganjalan bagi satu integrasi yang normal dengan komponen masyarakat yang lain.

Kedua, Pada 14 Mei 1959 pemerintah mengeluarkan PP No. 10 Tahun 1959 tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang asing diluar ibu kota Daerah Swantara Tingkat 1 dan II Serta kerisedenan. Peraturan ini berisi menetapkan bahwa semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diberi izin lagi setelah 31 desember 1959. Peraturan ini terutama ditujukan pada pedagang kecil Tionghoa yang merupakan bagian terbesar orang-orang asing yang melakukan usaha ditingkat desa.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan (kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948), orang-orang "bangsa Indonesia asli" dan orang di atas usia 21 tahun yang telah tinggal lebih dari lima tahun di bekas wilayah jajahan Hindia Belanda ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. Ketentuan ini menjamin hak kewarganegaraan Indonesia atas orang-orang Tionghoa yang sebelumnya berkewarganegaraan.

Keempat, Pada bulan Maret 1950, pemerintah Indonesia melancarkan serangkaian program ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan kekuatan orang-orang Indonesia asli di dunia usaha. Kebijakan yang dikenal sebagai Program Benteng ini menjadi kebijakan resmi Kabinet Natsir, yang mendasarkan kebijakan ini pada ketentuan hasil Konferensi Meja Bundar bahwa pemerintah Indonesia berhak untuk melindungi kepentingan nasional dan "golongan ekonomi lemah". Pada awalnya, yang menjadi target program ini adalah perusahaan-perusahaan yang masih dikuasai oleh pengusaha Belanda. Pada tahun 1953n Belanda.

Kelima, Pemerintah mengesahkan undang-undang kewarganegaraan yang baru pada tahun 1958. Pada Pasal 4, ketentuan harus memilih satu kewarganegaraan diperkuat, sehingga orang-orang Tionghoa yang otomatis memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia dan RRT dipaksa untuk memilih salah satu sebelum bulan Januari 1962. Ketidakjelasan hukum ini berlanjut sampai undang-undang ini dicabut.

Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang diskriminasi yang membelenggu etnis Tionghoa sehingga tidak bisa bebas beraktifitas dan pergerakannya menjadi terbelenggu, maka mereka mulai berani membentuk suatu organisasi-organisasi yang bertujuan untuk melawan diskriminasi yang dialami oleh etnis Tionghoa. Partai yang berbasis orang-orang Tionghoa seperti contohnya yaitu Partai Demokrat Tionghoa Indonesia atau yang disingkat dengan PDTI.

PDTI adalah sebuah partai politik yang ada selama era Demokrasi Terpimpin di Indonesia, dari tahun 1948 sampai 1965. Partai ini diidentifikasi dirinya sebagai pendukung untuk hubungan antara Indonesia dan Cina, serta mendukung pengajaran wajib bahasa Cina di sekolah-sekolah Indonesia. Partai ini diketuai oleh Thio Thiam Tjong yang berdiri pada 23 Mei 1948. Organisasi organisasi serupa pula juga makin banyak yang bermunculan seperti Perwitt, Perwanit dan Pertip. Setelah semakin banyak bermunculan organisasi yang ada di berbagai daerah maka demi terwujudnya berkurangnya diskriminasi yang ada di Indonesia maka dari itu diperlukan gerakan secara nasional dengan adanya Baperki sebagai gerakan nasional tersebut.

Tanggal 13 Maret 1954, di gedung Sin Ming Hui, berdasarkan risalah rapat hadir 44 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh PDTI, PERWANIP, PERWITT, PERTIP dan orang-orang cina dari berbagai aliran. Terjadi pemilihan yang dilangsungkan untuk membentuk suatu perkumpulan warga etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Pada saat awal pembentukan BAPERKI tokoh-tokoh golongan kanan seperti Khoe Woen Sioe, Tan Po Gwan, Auw Jong Peng Koen, Tan Siang Lian, tokoh-tokoh golongan kiri, seperti Siauw Giok Tjhan, Go Gien Tjwan dan Ang Jan Goan, dan mereka yang bergaris netral, seperti Thio Thiam Tjong, Oei Tjoe Tat, Yap Thiam Hien, Ong King Djoen, Tan Eng Tie, Lim Tjong Hian dan Liem Koen Seng mewakili dan turut hadir untuk membentuk Organisasi BAPERKI.

Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan atau yang dikenal dengan BAPERKI merupakan suatu organisasi yang diinisiasi oleh masyarakat etnis tionghoa. Organisasi ini mendukung satu tugas

nasional yaitu terwujudnya persamaan hak dalam bernegara bagi seluruh warga negara Indonesia. BAPERKI termasuk salah satu daripada ormas yang pertama-tama menerima konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957 dan demikian pula termasuk salah satu pendukung pancasila sebagai asas dasar negara serta mendukung dekret 5 Juli 1959.

Salah satu tokoh Tionghoa yang masuk ke dalam dunia politik adalah Oei Tjoe Tat. Oei Tjoe Tat merupakan keturunan Tionghoa kelahiran Solo pada tanggal 26 April 1922. Seperti keturunan Tionghoa pada umumnya, Oei Tjoe Tat kecil hidup di dalam lingkungan Tionghoa. Saat aktif berorganisasi pun Oei Tjoe Tat tetap berada pada lingkup organisasi keturunan Tionghoa seperti Sin Ming Hui (SMH), Partai Politik Tionghoa (PPT), Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI), dan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI). Oei Tjoe Tat menginginkan Indonesia yang pluralistik, tidak membedakan warga negaranya berdasarkan asal-usul, agama, rasial, budaya, dan pandangan politiknya (Roso Daras, 2013:98). Sejak pertama kali berorganisasi sampai menjadi politikus, kegiatan Oei Tjoe Tat cenderung dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Kegigihan Oei dalam memperjuangkan konsep integrasi, nampaknya sepaham dengan pemikiran pluralisme Bung Karno. Hal ini tersirat dalam pidato Bung Karno saat pembukaan Kongres Nasional Ke-8 BAPERKI, yang menyinggung soal asal daerah dalam penggunaan nama seseorang. Bung Karno menekankan bahwa untuk menjadi orang Indonesia, etnis apapun tidak perlu mengganti nama mereka.

Pada tahun 1963 terjadi suatu peristiwa rasialis yang sampai menimbulkan kerusuhan. Peristiwa rasialis anti Tionghoa tersebut dikenal dengan peristiwa 10 Mei (Benny G Setiono, 2003:806). Ditengah-tengah situasi yang penuh gejolak bagi kalangan Tionghoa tersebut Oei Tjoe Tat muncul sebagai tokoh penting di pemerintahan bahkan menjadi orang kepercayaan Soekarno.

Oei Tjoe Tat yang merupakan salah satu penggiat dalam persamaan hak bernegara bagi etnis Tionghoa dengan jasa-jasa yang dilakukannya sekarang membuat etnis Tionghoa diterima di Indonesia serta mendapatkan kebebasan dalam bernegara sebagaimana mestinya orang-orang pribumi lainnya yang merupakan penduduk asli Indonesia. Semua hal itu tidak bisa terlepas dari upaya gigih dari Oei Tjoe Tat dan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai "Aktivitas Dan Perjuangan WNI

Keturunan China Dalam Persamaan Hak Sebagai Warga Negara Tahun 1954 - 1965".

## **2. METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode historis. Peneliti memakai metode historis dikarenakan karena data-data dan fakta diambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya baik yang terdapat pada buku, dokumen dan media cetak serta benda-benda peninggalan yang menjadi objek tempat penelitian.

Adapun empat langkah penelitian historis yaitu heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan historiografi. Heuristik yaitu peneliti berusaha untuk mencari dan mengumpulkan data-data terkait penelitian, seperti buku-buku baik berupa tercetak atau non-cetak, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas dan perjuangan WNI keturunan China dalam persamaan hak sebagai warga negara tahun 1954 - 1965 yang akan dilakukan di badan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), jurnal-jurnal ilmiah yang peneliti akses melalui google cendekia.

Kritik yaitu peneliti mengkaji sumber sejarah dari luar, seperti keaslian dari kertas yang dipakai, gaya tulisan, ejaan bahasa dan semua bentuk sumber sejarah dari penampilan luar, serta melihat isi dari sumber yang akan digunakan dalam penelitian. Interpretasi yaitu peneliti menafsirkan dari data-data yang sudah didapat dan sudah melalui tahap kritik.

Historiografi yaitu peneliti menuliskan cerita sejarah sesuai dengan sudut pandang peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data historis kegiatan yang diawali dengan mengumpulkan data, kemudian melakukan kritik sumber. Dari sinilah peneliti akan mengetahui data-data mana yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu juga, data yang sudah melalui tahap kritik sumber perlu dikaitkan dengan teori serta metode penelitian sejarah dan kemudian menjadi sebuah fakta sejarah. Dari fakta sejarah inilah peneliti dapat menceritakan cerita sejarah secara utuh sesuai dengan sudut pandang peneliti.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Diskriminasi Etnis Tionghoa**

Keberagaman yang ada di Indonesia menjadi tantangan tersendiri dikarenakan berbagai macam kebudayaan dan kebiasaan berbaur menjadi satu di tanah air Indonesia, hal ini mengakibatkan seluruh masyarakat Indonesia harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi terhadap satu sama lain.

Beberapa contoh mengenai diskriminasi rasial yang terjadi yaitu sebagai berikut: Pertama, pemerintahan orde lama Presiden Soekarno menjanjikan persamaan hak-hak sipil dan politik kepada etnis Tionghoa tetapi dalam kenyataannya masih saja terjadi diskriminasi di antaranya dalam kesempatan menjadi pimpinan Nasionalis Indonesia seperti yang diatur dalam UUD 1945. Kedua, Pada 14 Mei 1959 pemerintah mengeluarkan PP No. 10 Tahun 1959 tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang asing diluar ibu kota Daerah Swantara Tingkat 1 dan II Serta kerisedenan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan (kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948), orang-orang "bangsa Indonesia asli" dan orang di atas usia 21 tahun yang telah tinggal lebih dari lima tahun di bekas wilayah jajahan Hindia Belanda ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. Ketentuan ini menjamin hak kewarganegaraan Indonesia atas orang-orang Tionghoa yang sebelumnya berkewarganegaraan Belanda.

Keempat, Pada bulan Maret 1950, pemerintah Indonesia melancarkan serangkaian program ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan kekuatan orang-orang Indonesia asli di dunia usaha. Kelima, Pemerintah mengesahkan undang-undang kewarganegaraan yang baru pada tahun 1958. Pada Pasal 4, ketentuan harus memilih satu kewarganegaraan diperkuat, sehingga orang-orang Tionghoa yang otomatis memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia dan RRT dipaksa untuk memilih salah satu sebelum bulan Januari 1962.

#### **B. Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI)**

Partai Demokrat Tionghoa Indonesia atau yang disingkat dengan PDTI adalah sebuah partai politik yang ada selama era Demokrasi Terpimpin di Indonesia, dari tahun 1948 sampai 1965. Partai ini diidentifikasi dirinya sebagai pendukung untuk hubungan antara Indonesia dan Cina, serta mendukung pengajaran wajib bahasa Cina di sekolah-sekolah Indonesia. Partai ini diketuai oleh Thio Thiam Tjong yang berdiri pada 23 Mei 1948 dengan nama Partai Persatuan Tionghok, dan bermarkas di Jakarta serta memiliki cabang – cabang di daerah, ideologi dari partai ini yaitu kanan tengah, federalisme, indonesia, nasionalisme cina.

Partai Demokrat Tionghoa Indonesia ini menjadi salah satu pencetus timbulnya organisasi Baperki, hal ini dikarenakan pada waktu itu sedang terjadi kegelisahan di tubuh PDTI yang kurang maksimal dalam melawan diskriminasi yang berkembang pada

saat itu mereka merasa hal itu terjadi karena anggota-anggota yang ada di dalam mereka terikat pula dengan organisasi lain sehingga menjadikan pemahaman yang didapatkan setiap anggota bisa menjadi berbeda.

#### **C. Persatuan Warga Negara Indonesia Turunan Tionghoa (PERWITT)**

Persatuan Warga Negara Indonesia Turunan Tionghoa atau orang menyebutnya dengan PERWITT merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh orang-orang etnis Tionghoa yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi yang ingin mewujudkan perdamaian tanpa adanya diskriminasi yang telah terjadi pada masa itu. Organisasi ini didirikan pada tanggal 2 Maret 1954 di gedung sekolah Tionghoa Porrong yaitu di wilayah Jawa Timur. Organisasi ini lebih berfokus pada politik yang dijalankan dengan tujuan untuk mengurangi diskriminasi yang ada di Indonesia pada saat itu dikarenakan diskriminasi yang terjadi pada saat itu sudah mengkhawatirkan.

#### **D. Persatuan Warga Indonesia Tionghoa (PERWANIT) dan Perserikatan Tionghoa Peranakan (PERTIP)**

Organisasi-oranisasi ini dibentuk berbagai macam nama, namun fokus tujuan satu, dikarenakan mereka yang berbeda beda wilayah atau masih bersifat kedaerahan dengan kata lain bahwa warga negara keturunan etnis Tionghoa ingin untuk menyelesaikan diskriminasi yang ada di wilayah masing masing maka dari itu terbentuk banyak sekali organisasi serupa di berbagai wilayah pada masa itu.

#### **E. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI)**

Tanggal 13 Maret 1954, di gedung Sin Ming Hui, berdasarkan risalah rapat hadir 44 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh PDTI, PERWANIP, PERWITT, PERTIP dan orang-orang cina dari berbagai aliran. Keputusan dari rapat pembentukan pada saat itu adalah membentuk suatu organisasi massa bukan partai politik. Organisasi massa dinilai lebih dapat mendapatkan dukungan dari pada partai politik, karena dapat menampung anggota dari partai manapun. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan atau yang dikenal dengan BAPERKI merupakan suatu organisasi yang diinisiasi oleh masyarakat etnis tionghoa. Organisasi ini mendukung satu tugas nasional yaitu terwujudnya persamaan hak dalam bernegara bagi seluruh warga negara Indonesia.

1. Tujuan BAPERKI sebagaimana diterangkan dalam anggaran dasar BAPERKI pasal 3, ialah:

- a. Memperjuangkan pelaksanaan cita-cita nasional, yaitu untuk menjadikan tiap-tiap warganegara seorang warganegara indonesia yang sejati.
- b. Memperjuangkan pelaksanaan asas-asas demokrasi dan hak-hak asasi manusia.
- c. Memperjuangkan reaksisasi persamaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta kesempatan-kesempatan untuk maju bagi tiap warganegara dengan tidak memandang keturunannya, kebudayaannya, adat kebiasaannya, maupun agamanya. (KOTI 895, Pidato peringatan Ulang Tahun Ke-11 BAPERKI).

#### **F. Tokoh Oei Tjoe Tat dalam memperjuangkan Etnis Tionghoa**

Etnis Tionghoa di Indonesia sejak zaman kolonial sering mendapatkan diskriminasi, permasalahan rasial, cap negatif dan lain sebagainya. Berbagai permasalahan tersebut juga sering didapatkan oleh orang-orang Tionghoa dalam aktifitasnya di dunia politik maupun pemerintahan Indonesia. Orang Tionghoa dikhawatirkan hanya akan menjadi “binatang ekonomi” yang bersifat oportunistis, tidak memiliki loyalitas politik, tidak nasionalis dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri (Nurani. Soyomukti, 2012:168) Oleh sebab itu kebanyakan orang minoritas Tionghoa lebih memilih menjauhkan diri dari dunia politik. Salah satu tokoh yang memperjuangkan hak etnis Tionghoa adalah Oei Tjoe Tat.

Oei Tjoe Tat dilahirkan di Solo, pada 26 April 1922, sebagai anak ke-6 dari pasangan Oei Ing Wie dan Ong Tin Nio. Ayah dan Ibu Oei Tjoe Tat besar dan tinggal di Yogya, dan mereka baru menetap di Soo pada tahun 1907.

#### **G. Aktivitas yang dilakukan etnis Tionghoa dalam melawan Diskriminasi**

1. Partai Demokrat Tionghoa Indonesia Aktivitas yang dilakukan Partai Demokrat Tionghoa Indonesia yaitu: PDTI tidak menghendaki adanya persoalan “golongan kecil”.
2. Persatuan Warga Negara Indonesia Turunan Tionghoa (PERWITT). Aktivitas yang dilakukan Perwitt dalam perkembangan organisasinya yaitu dengan: Pernyataan Perwitt mengenai rancangan undang-undang kewarganegaraan.
3. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI). Aktivitas yang dilakukan Baperki dalam melawan diskriminasi antara lain: Permintaan Baperki untuk turut serta dalam penyempurnaan Pancawardhana; Harapan-harapan Komisi IV Baperki dalam melawan diskriminasi

dan rasialisme; Konferensi Pleno Baperki awal tonggak perjuangan melawan diskriminasi.

4. Oei Tjoe Tat. Aktivitas yang dilakukan oleh Oei Tjoe Tat sebagai salah seorang warga Etnis Keturunan Tionghoa yang lahir dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi ditunjukkan dengan tindakan-tindakannya yaitu Oei Tjoe Tat terjun ke dunia Politik; Peranan Oei Tjoe Tat sebagai anggota konstituante dan menteri negara .
5. Perjuangan yang dilakukan Etnis Keturunan Tionghoa dalam melawan diskriminasi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI). Perjuangan Baperki menghapus peraturan yang dinilai diskriminatif; Perjuangan Baperki melawan diskriminasi dimulai dari kongres wilayah pertama Baperki; Perjuangan Hak bagi umat Budha agar diperlakukan sama dengan agama lain. Oei Tjoe Tat menentang konsep asimilasi. Perjuangan melawan diskriminasi dengan menjadi menteri negara

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas dan perjuangan etnis Tionghoa dalam memperjuangkan persamaan hak sebagai warga negara adalah sebagai berikut:

1. BAPERKI merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat organisasi tionghoa lain yang bergabung dengan Baperki. Alasan mereka bergabung dengan Baperki selain itu juga adalah untuk menghindari tumpang tindih dalam praktek melawan diskriminasi akibat dari ideologi partai yang berbeda beda. Setelah dirasa tidak relevan lagi bagi organisasi-organisasi etnis Tionghoa untuk menjalankan aktivitas dan perjuangannya dalam melawan diskriminasi dikarenakan tindakan yang mereka lakukan tidak berjalan secara 100 persen, maka dari itu organisasi-organisasi di atas bergabung untuk membentuk organisasi Baperki yang tujuan dan visi misi yang diemban banyak memiliki kesamaan.
2. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan atau yang dikenal dengan BAPERKI merupakan suatu organisasi yang diinisiasi oleh masyarakat etnis tionghoa. organisasi ini mendukung satu tugas nasional yaitu terwujudnya persamaan hak dalam bernegara bagi seluruh warga negara Indonesia. Aktivitas dan perjuangan yang dilakukan oleh Baperki dalam memperjuangkan persamaan hak etnis Tionghoa yaitu:
  - a. Pada tahun 1964 Baperki membuat suatu permintaan pada pemerintah pusat, untuk

- diikutsertakan dalam Panitia Negara Penyempurnaan Pancawardhana.
- b. Baperki memiliki harapan-harapan yang berguna untuk kesatuan dan persatuan Indonesia demi berkurangnya diskriminasi yang ada di tengah-tengah masyarakat.
  - c. Baperki berusaha untuk menghapuskan peraturan-peraturan yang mengandung unsur-unsur pandangan rasialisme
  - d. Baperki mengadakan Konperensi Pleno Ke-II yang dilakukan di Surabaya, dengan hasil yang ada dalam konferensi ini dijadikan para anggota Baperki untuk melangkah lebih maju secara searah dan bersama-sama.
  - e. Baperki menyusun program kerja untuk melaksanakan semua keputusan kongres dengan memperhatikan kondisi-kondisi khusus di daerah.
  - f. BAPERKI membuat pernyataan bersama bahwa Agama Budha yang harus diperlakukan sama seperti agama lain
3. Oei Tjoe Tat sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan demi mendapatkan pengakuan dari masyarakat dengan wujud nyata dan dedikasinya untuk Indonesia. selain itu perjuangan Oei Tjoe Tat dalam melawan diskriminasi dan memperjuangkan hak etnis Tionghoa pada saat itu dilakukan dengan cara :
- a. Oei Tjoe Tat mengawali Perjuangannya melawan diskriminasi dengan terlebih dahulu ia terjun ke dunia politik.
  - b. Oei Tjoe Tat menentang Konsep asimilasi yang dianggap merugikan dan mendiskriminasi etnis Tionghoa.
  - c. Oei Tjoe Tat diangkat Sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presidium, dan memiliki lingkup kerja yang luas.
  - d. Oei Tjoe Tat menjadi anggota Konstituante, ia mendorong keluarnya dekret presiden yang mengakhiri sistem pemerintah dan politik parlementer di Indonesia.
  - e. Aktivitas dan perjuangan yang dilakukan oleh Baperki, Oei Tjoe Tat serta organisasi-organisasi lain dalam memperjuangkan hak etnis Tionghoa berjalan mulus dan hal ini ditandai dengan masyarakat etnis Tionghoa yang mulai berani berperan dalam dunia politik dan bahkan menyalonkan diri sebagai wakil rakyat pada pemilu 1955 yang pada saat itu Baperki mendapatkan 1 kursi pemerintahan DPR. Berdasarkan hal ini pula menjadi motivasi dan semangat dalam terus berjuang melawan diskriminasi yang ada di Indonesia terhadap etnis Tionghoa itu sendiri. Namun perjuangan yang dilakukan para masyarakat etnis Tionghoa melawan diskriminasi tidak hanya sampai tahun 1965 mereka pada masa orde baru pun masih harus berjuang untuk melawan diskriminasi yang terjadi kepada mereka akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintahan saat itu.
  - f. Aktivitas yang dilakukan oleh etnis tionghoa dalam melawan diskriminasi yang ada dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan : PDTI tidak menghendaki adanya persoalan “golongan kecil”, Pernyataan Perwitt mengenai rancangan undang-undang kewarganegaraan, Permintaan Baperki untuk turut serta dalam penyempurnaan Pancawardhana, Harapan-harapan Komisi IV Baperki dalam melawan diskriminasi dan rasialisme, Konferensi Pleno Baperki awal tonggak perjuangan melawan diskriminasi, selain dilakukan oleh organisasi terdapat pula salah satu tokoh yang melakukan aktivitas dalam melawan diskriminasi yaitu Oei Tjoe Tat dengan melakukan : Oei Tjoe Tat terjun ke dunia Politik, Peranan Oei Tjoe Tat sebagai anggota konstituante dan menteri negara
  - g. Perjuangan yang dilakukan oleh organisasi dan Oei Tjoe Tat dalam melawan diskriminasi yaitu dengan : Perjuangan Baperki menghapus peraturan yang dinilai diskriminatif, Perjuangan Baperki melawan diskriminasi dimulai dari kongres wilayah pertama Baperki, Perjuangan Hak bagi umat Budha agar diperlakukan sama dengan agama lain, Oei Tjoe Tat menentang konsep asimilasi, Perjuangan Oei melawan diskriminasi dengan menjadi menteri negara
  - h. Harapan yang diinginkan dari perjuangan yang dilakukan oleh etnis tionghoa adalah bagaimana tidak adanya diskriminasi lagi yang didapatkan oleh masyarakat etnis Tionghoa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Perkasa. (2012). *Orang-Orang Tionghoa dan Islam di Majapahit*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Arsip Tektual Komando Operasi Tertinggi, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia No. 889.
- Arsip Tektual Komando Operasi Tertinggi, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia No. 892.
- Benny G. Setiono. (2003). *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.

- Biker Pintar, "Pengertian dan Arti Aktivitas", <http://hondacbmmodifikasi.com>, diakses 16 September 2021.
- Danial, A.R., Endang dan Wasriah Nana. (2009). *Metoda Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium PKn Upi.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. (1981). *Kamus Besar bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Dimiyati, J. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dwijaja Utama. (2019) *Jurnal Pendidikan: "Dwijaja Utama" Forum komunikasi pengembangan profesi pendidik kota Surakarta. edisi 42/volume 10/Februari 2019*. Hlm 82.
- Hesti Armiwulan Sochmawardiah. (2013). *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM, studi tentang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa*. Hlm 130
- Herbert Feith, (2001) *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm. 10.
- Hesti Armiwulan Sochmawardiah. (2013). *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM, studi tentang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa*. Hlm 130
- Hugiono & Poerwantana. (1987). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*.
- Kepolisian Negara Bagian D.P.K.M (1954). *Perkembangan Organisasi Warga Negara Indonesia Turunan Tionghoa*.
- Koentjaraningrat. (2007). *Manusia dan Kebudayaan*, Jakarta: Djambatan.
- Konvergensi. (2019). *Jurnal Konvergensi Edisi 30/volume VII/Oktobre 2019*.
- Mohammad Nasir. (1983). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Nurani Soyomukti. (2012). *Soekarno dan Cina*. Yogyakarta: Garasi.
- Notosusanto, N. (1984). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Inti Indayu.
- Oei Tjoe Tat. (1995) *Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno*. Jakarta: Hasta Mitra.
- P.R.S. Mani. (1989). *Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah*. Jakarta: Grafiti.
- Perhimpunan Warga Negara Indonesia Turunan Tionghoa. (1954). *Pernyataan Sikap Perwitt mengenai Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan*.
- Roso Daras.(2013). *Total Bung Karno Serpihan Sejarah yang Tercecer*. Jakarta: Imania.
- Nasution, Didaktik Asas -Asas Mengajar. (2010). Jakarta: Bumi Aksara.
- Siauw Tiong Djin.Siauw Giok Tjhan, *Perjuangan Seorang Patriot Membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika*.
- STIKI Malang, (2006). *Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia*
- Teuku Muttaqin (2014). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Bermuatan General Education*, Star kuala University Press.
- Thaib, D. (1988). *Pancasila yuridis konstitusional*. Yogyakarta: Penerbit Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia.
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zainal Arifin. (2020). *Metode Diskusi kelompok dan Penerapannya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Zakiah Darajat. (2011). *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zed Mestika. (2008). *Metodo Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkarnain (2001) , *Jalan Meneguhkan Negara Sejarah Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pujangga Press.